

BAB I

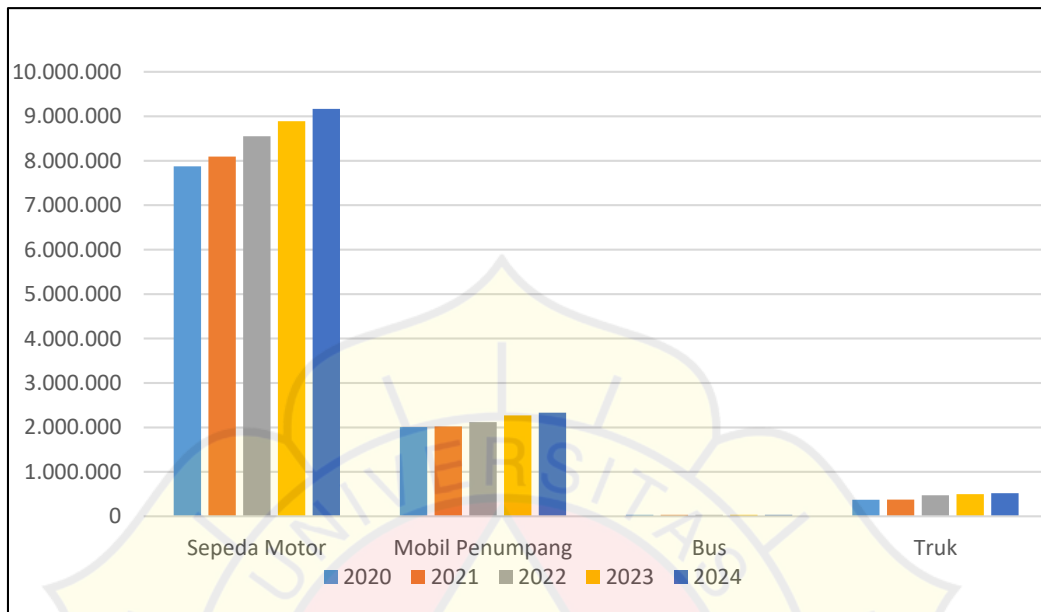
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang sangat vital bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, kemampuan daerah untuk menggali potensi pendapatan aslinya menjadi indikator penting kemandirian finansial suatu daerah. Salah satu komponen utama PAD yang memiliki kontribusi signifikan adalah pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan berbagai jenis retribusi daerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian nasional memiliki karakteristik unik dalam hal jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Tingginya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di Jakarta menjadikan sektor transportasi, khususnya kendaraan bermotor, sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan kendaraan, seperti PKB dan BBNKB, serta dari berbagai jenis retribusi yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas transportasi.

Gambar 1.1
Jumlah Kendaraan di Provinsi DKI Jakarta 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Gambar di atas menunjukkan jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak, dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Mobil penumpang menempati posisi kedua terbanyak dan juga menunjukkan tren kenaikan selama periode tersebut.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 telah mencapai Rp 7,6 triliun per Oktober 2023, menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PAD provinsi. Dinamika kebijakan perpajakan kendaraan bermotor di Jakarta juga mengalami berbagai perubahan strategis dalam periode 2022-2024. Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan sistem pajak progresif untuk kendaraan bermotor dengan tarif yang bervariasi antara 0,5% hingga 1%, yang mulai berlaku efektif

pada awal tahun 2025. Selain itu, kebijakan khusus juga diterapkan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, dimana tarif PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023.

Kompleksitas pengelolaan PAD dari sektor kendaraan bermotor tidak hanya terbatas pada PKB dan BBNKB, namun juga melibatkan berbagai jenis retribusi daerah yang terkait dengan pelayanan kendaraan bermotor. Retribusi daerah sebagai pungutan yang dikenakan atas jasa atau kegiatan tertentu yang disediakan pemerintah daerah juga memberikan kontribusi yang tidak dapat diabaikan dalam struktur PAD.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen (tambahan pungutan) terhadap pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan agregat kabupaten/kota hingga 10,08%, meskipun dapat menurunkan pendapatan provinsi. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara kebijakan perpajakan kendaraan bermotor dengan optimalisasi PAD di berbagai tingkat pemerintahan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan retribusi daerah (RD) merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki populasi dan mobilitas kendaraan yang

tinggi, menjadikan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Retribusi Daerah (RD) sebagai potensi besar untuk meningkatkan PAD. Namun, fluktuasi PAD dari sektor ini seringkali menjadi tantangan. Penelitian Othman *et al.* (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi kendaraan bermotor sangat bergantung pada kebijakan yang efektif dan efisiensi administrasi.

Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah populasi, dan kebijakan perpajakan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan PAD. Studi oleh Kim & Lee (2023) menemukan bahwa adanya insentif pajak dan kemudahan prosedur pembayaran dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, di sisi lain, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan ini secara optimal dapat menyebabkan kebocoran pendapatan.

DKI Jakarta mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan signifikan dalam penerimaan PKB, BBNKB, dan retribusi daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara pertumbuhan objek pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih adanya kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta adanya kebijakan yang belum optimal dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor ini.

Secara teoretis, teori *Laffer Curve* menyatakan bahwa terdapat titik optimal tarif pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, banyak penelitian, seperti yang dilakukan oleh Wang *et al.* (2023), menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan karena faktor-faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kesadaran pajak. Selain itu, teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi administrasi dan sanksi yang diterapkan. Gap teori dalam konteks ini adalah adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kondisi aktual di DKI Jakarta, di mana meskipun kebijakan telah diterapkan, realisasi PAD dari sektor kendaraan bermotor masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menganalisis faktor-faktor yang secara empiris paling berpengaruh di DKI Jakarta.

Penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan Penelitian ini tidak hanya mengukur pengaruh secara statistik, tetapi juga menganalisis implikasi kebijakan dari temuan yang ada, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan sosial di DKI Jakarta. Penelitian terdahulu baik di tingkat nasional maupun internasional, telah banyak membahas hubungan antara pajak, retribusi, dan PAD. Studi oleh Othman *et al.* (2024) menyoroti pentingnya efisiensi administrasi pajak untuk memaksimalkan penerimaan. Sementara itu, Kim & Lee (2023) menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan, pada akhirnya, PAD. Wang *et al.* (2023). hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak tidak selalu berbanding

lurus dengan kenaikan pendapatan karena faktor-faktor lain seperti daya beli masyarakat dan kesadaran pajak. Lebih lanjut, penelitian Zhao & Li (2024) bahwa digitalisasi layanan pajak dan retribusi dapat secara signifikan mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan transparansi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan PAD. Aspek ini penting untuk dipertimbangkan dalam konteks DKI Jakarta yang sedang gencar melakukan transformasi digital.

Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2022-2024”**.

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat sejumlah persoalan yang relevan dengan topik penelitian ini. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): DKI Jakarta memiliki jumlah kendaraan bermotor yang tinggi, namun realisasi penerimaan dari PKB cenderung belum optimal dan mengalami fluktuasi di beberapa tahun.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor: Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan

tepat waktu menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan PKB.

3. Kurangnya efektivitas dalam pengelolaan dan administrasi PKB dan BBNKB: Sistem administrasi perpajakan daerah, khususnya terkait kendaraan bermotor, masih menghadapi tantangan dari segi efisiensi, transparansi, dan integrasi data.
4. Fluktuasi penerimaan retribusi daerah: Data realisasi retribusi daerah menunjukkan ketidakstabilan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan belum maksimalnya pengelolaan sektor-sektor yang menjadi sumber retribusi.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dikarenakan begitu luasnya objek penelitian yang diteliti. Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan terarah, peneliti memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian, yaitu hanya membahas mengenai pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2024. Pembatasan ini dilakukan karena Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah merupakan komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga penting untuk dianalisis secara lebih mendalam.

1.2.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka cakupan permasalahan yang dibahas dalam penelitian berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2024” adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian, memperoleh data empiris, serta melakukan analisis terkait hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kemajuan wilayah provinsi tersebut.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, bahan pembelajaran, serta referensi dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan topik atau permasalahan serupa.

4. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi dan referensi yang berguna untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan dari sektor pajak daerah.